

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 61- 62.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50
- Danang Sunyoto, Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h. 55
- Faisal Salam, Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia, Mandar Maju, 2009 h.43
- G.Kartosapoetra, dkk. Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta : Dunia Aksara, hal. 29.
- Johnny Ibrahim (2006) . Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing 2. Hlm. 392.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 54- 56
- Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan Tahun 2021
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,Kencana Prenada, 2010, hal.35&133
- Philipus M. Hadjon.(2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.Yogyakarta Gajah Mada University Press.Hlm.10
- Priambada Komang dan Maharta Agus Eka, Outsourcing Versus Serikat Pekerja, Alihdaya Media Network, Jakarta, 2008, h 3
- Rajaguguk, 2002, Peran serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Codetermination), Edisi I, Yayasan Obor, Jakarta, hal. 79.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54.
- Sehat Damanik. Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. DSS Publishing, 2006, h. 28

- Soehatman Ramli, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hal. 14.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Hal -10
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13
- Sugeng Pujileksono, Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Perspektif Pemenuhan Keadilan & Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Penerbit Setara Press, Malang, 2016. h. 260.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung .Alfabeta. 2008
- Suherman,Perkembangan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Jangka Panjang.LPPM UPN Veteran Jakarta Press. Jakarta. h.10
- Zaeni Asshadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Pekerja Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2008 hlm 35 dan 83.
- Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal 10.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 114-115.

## **2. Jurnal dan Tesis**

- Budiman, Willy, Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Jaminan Kesehatan Pekerja Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Menurut Undang-Undang.Tesis.2016
- Dede Agus, Perkembangan pengaturan jaminan sosial pekerja dalam rangka perlindungan hukum buruh/pekerja. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.
- Hafizha Hasna Afifah, Imam Haryanto. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Bila Tidak Mengikuti Pengaturan Upah Minimum Bagi Pekerja Di Indonesia, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. 2022, h. 726
- Muhammad Yafi Azhari , Abdul Halim, Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia, Media Iuris Vol. 4 No. 2.,2021,h 178
- Prima Maharani Putri, Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Soisal Kesehatan,Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi ,2019 hlm 81
- Suyoko, Mohammad Ghufron AZ, Tinjauan yuridis terhadap sistem alih daya (outsourcing) pada pekerja di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum,2021, h 100

## **3. Undang-Undang**

- Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang  
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain  
Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan  
Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan BPJS Kesehatan No 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Tata Cara Dan  
Mekanisme Kerja Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja  
Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja,  
Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan  
Kesehatan

Peraturan Presiden No 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan  
Kehilangan Pekerjaan